

ETIKA POLITIK IBNU KHALDUN
(Analisis Terhadap Konsep Kepemimpinan dalam *Muqaddimah*)



oleh:

Muflih Fahmi Kaunain, S. IP

NIM: 1520310101

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA
2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muflih Fahmi Kaunain, S.IP
NIM : 1520310101
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 6 Mei 2017

Saya yang menyatakan,



Muflih Fahmi Kaunain, S.IP
NIM: 150310101

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muflih Fahmi Kaunain, S.IP
NIM : 1520310101
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan Islam

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi, jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Mei 2017

Saya yang menyatakan



Muflih Fahmi Kaunain, S.IP

NIM : 1520310101



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-371/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : "ETIKA POLITIK IBNU KHALDUN (ANALISIS TERHADAP KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM MUQADDIMAH)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUFLIH FAHMI KAUNAIN, S.IP
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310101
Telah diujikan pada : Rabu, 02 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji II

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Yogyakarta, 02 Agustus 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

ETIKA POLITIK IBNU KHALDUN (Analisis Konsep Kepemimpinan dalam Muqoddimah)

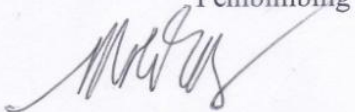
Yang ditulis oleh :

Nama : Muflih Fahmi Kaunain, S.IP
NIM : 1520310101
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamualaikum wr.wb.

Yogyakarta, 12 Mei 2017
Pembimbing



Dr. M. Nur, M.Ag
NIP. 19700816 199703 1002

ABSTRAK

Sejarah umat manusia yang sangat panjang bisa kita ditelusuri melalui peradabannya. Dari abad ke abad, dari milenium ke milenium tercatat banyak peradaban-peradaban besar yang berdiri dan saling bersaing membangun kejayaan dan hegemoni atas peradaban lain. Peradaban besar kuno seperti di Suriah Besar, Mesopotamia, Mesir Kuno, Byzantium, Persia, Romawi, Peradaban masa kekhalifahan Islam, namun kehebatan dan kemegahan peradaban-peradaban tersebut tidak bisa menghindari dari kehancuran dan kemunduran. Bagi Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin bin Khaldun, atau dikenal dengan Ibnu Khaldun yang merupakan ulama besar Islam, ilmuwan, sejarawan, negarawan dan akademisi yang sudah memprediksi secara detail tentang maju mundurnya peradaban dari hal yang terkecil sampai yang terbesar. Baginya apabila ditarik garis merah antarperadaban tersebut kemunduran yang dialami terjadi ketika moral atau akhlaq yang tidak diperhatikan lagi dalam memimpin dan berkuasa. Tidak hanya moral dan akhlaq pemimpinya, namun juga rakyatnya.

Dalam *Muqoddimah*, karya monumental Ibnu Khaldun, sejarah menjadi sesuatu yang rasional, faktual dan bebas dari dongeng-dongeng. Bermodalkan pengalamannya yang malang-melintang di dunia politik pada masanya, Ibnu Khaldun mampu menulis *Al-Muqaddimah* dengan jernih. Dalam kitabnya itu, Ibnu Khaldun juga membahas peradaban manusia, hukum-hukum kemasyarakatan dan perubahan sosial.

Dalam penelitian kali ini, akan dibahas dan dianalisis bagaimana konsep etika politik menurut Ibnu Khaldun, karena dalam *Muqoddimah* memang tidak dijelaskan secara eksplisit dan tersistematis bagaimana konsep etika politik menurut Ibnu Khaldun. Penelitian ini menarik, karena akan menemukan konsep politik Ibnu Khaldun yang masih sporadis dalam *Muqoddimah*. Dimana seperti yang diketahui, *Muqoddimah* adalah buku yang dikenal sebagai salah satu buku rujukan dalam bidang sosiologi dan sejarah. Sehingga akan menjadi hal baru bahwa *Muqoddimah* juga memiliki konsep etika politik.

Dengan menggunakan teori Arkeologi Pengetahuan Michael Foucault dan Etika Politik Franz Magnis Suseno, akan ditemukan bagaimana etika politik dalam *Muqoddimah*. Arkeologi Pengetahuan akan mengangkat fakta-fakta sejarah dalam *Muqoddimah* yang berhubungan dengan etika politik. Sementara Etika Politik Franz-Magnis Suseno akan menyajikan fakta-fakta sejarah yang ditemukan agar menjadi konsep etika politik yang sistematis dan mudah dipahami. Selain itu, dengan metode penelitian kualitatif, jenis penelitian literasi dan pendekatan hermenetik, penelitian ini akan menjadi rujukan bagaimana etika seorang pemimpin seharusnya dengan bukti sejarah yang ada.

Kata Kunci: Ibnu Khaldun, Muqoddimah dan Etika Politik

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 September 1985 No: 158 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Khā	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sín	S	Es
ش	Syín	Sy	Es dan Ye
ص	Sád	Ş	Es (titik di bawah)
ض	Dád	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Tá	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Zá	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	Ain	--	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

A. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

B. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *Kasrah* (ِ) ditulis i, dan *Dammah* (ُ) ditulis u.

Contoh : أَحْمَدَ ditulis *ahmada*.

رَفِيقَ ditulis *rafiqa*.

صَلِحَ ditulis *saluha*.

C. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis á, bunyi i panjang ditulis í dan bunyi u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis á(garis di atas)

فَلَا ditulis *falá*

2. Kasrah + Ya mati ditulis í(garis di atas)

مِثَاقِا ditulis *mísáq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis û

أَصُولِا ditulis *usûl*

D. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya mati ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

قول ditulis *qaul*

E. Ta Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h :

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *nimatulláh*

زكاة الفطر ditulis *zakátul-fitri*

F. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *watun*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabâ ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *takhuzûna*.

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf 1 diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa*.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Puji syukur kepada Allah atas nikmat, hidayah, dan kesehatan yang diberikan, sehingga tesis dengan judul, “Etika Politik Ibnu Khaldun : Analisis Konsep Kepemimpinan dalam Muqoddimah” ini berhasil terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam tidak kita lupa panjatkan kepada Baginda Muhammad SAW, yang selalu setia dan sabar membimbing umatnya dengan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak.

Tentunya, sangat saya sadari bahwa penulisan dan hasil tesis ini tidak lepas dari kritikan, masukan, serta bantuan yang tak terhingga dari berbagai pihak yang terlibat langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada berbagai pihak, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Drs. K.H Yudian Wahyudi, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag
3. Kepala Program Studi Program Magister (S2) Hukum Islam, Dr. Bahiej, M. Hum

4. Kepada Dosen Pembimbing, Dr. M. Nur, M. Ag yang telah sabar dalam membimbing tesis ini hingga paripurna.
5. Secara khusus kepada Ayah (Faqih Al-Aziz) dan Ibu (Siti Sri Achadiyah) tercinta, atas kesabaran, doa dan tirakat dalam merawat dan membimbing hingga hari ini.
6. Kepada Kyai Muhammad Mustafied yang telah membimbing dan dengan ikhlas merawat menuju keilmuan dan kearifan baru selama di Jogja.
7. Kepada Adik-adikku Arina Ilmi Tanzila dan Ahmad Nadhif Haq yang menjadi cahaya di rumah dengan canda tawanya.
8. Kepada Bapak Mukhlisin Purnomo dan Ibu Khimsin Mutiatul Baroroh, dan juga segenap keluarga besar Darul Hadlonah “Bintan Sa’adillah Arrasyad” yang telah membimbing, menjadi tempat bernaung dan memberikan ilmu kehidupan yang sejati
9. Kepada teman-teman di Prodi Studi Politik dan Pemerintahan Islam, yang tidak bisa disebut satu per satu, yang telah menjadi tempat bernaung selama belajar di kampus.
10. Kepada teman-teman di PPM Aswaja Nusantara yang telah bersedia memberi ruang untuk belajar dan saling memahani.
11. Secara khusus kepada seseorang yang telah memberi pengetahuan pengalaman bahwa wanita adalah sosok yang sulit dipahami.

12. Kepada seluruh Staff di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijag di berbagai bagian yang telah memfasilitasi secara langsung dan tidak langsung selama kegiatan belajar di kampus.
13. Kepada pihak-pihak lain yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung.

Yogyakarta, 7 Mei 2017

Penyusun,



Muflin Fahmi Kaunain

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Penulisan	27
BAB II : KAJIAN TEORITIK	
A. Arkeologi Pengetahuan	29
B. Epistemologi Etika dan Moral	32
C. Etika Politik	38
1. Etika Politik Kekuasaan Religius	43
2. Legitimasi Kekuasaan Religius	47
BAB III : MUQODDIMAH SEBAGAI MAGNUM OPPUS IBNU KHALDUN	
A. Ibnu Khaldun Dan Sejarah	50
B. Muqoddimah sebagai magnum oppus ibnu khaldun	61

BAB IV : ETIKA POLITIK IBNU KHALDUN

A. Arkeologi Etika Politik Ibnu Khaldun74

B. Etika Politik Kekuasaan Religius

1. Inti Paham Kekuasaan Religius92

2. Legitimasi Kekuasaan Religius106

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan116

B. Saran118

DAFTAR PUSTAKA120

DAFTAR RIWAYAT HIDUP123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dipungkiri lagi, manusia adalah makhluk yang membutuhkan pengekspresian diri melalui “kebudayaan”.¹ Kebudayaan ini lah ekspresi murni manusia dalam hubungannya dengan yang di luar manusia sesuai dengan runag dan waktu yang berbeda-beda pula tentunya. Maka ditemukan berbagai macam ekspresi kebudayaan manusia yang tidak identik sama sekali di seluruh belahan bumi manusia. Dengan adanya kebudayaan, manusia sebagai makhluk yang berakal dan bernaluri kreatif, secara otomatis akan terbentuk adanya koloni atau komunitas untuk mengaktualisasikan kebudayaannya. Komunitas ini muncul karena naluri dasar manusia sebagai makhluk sosial yang butuh interaksi dan kenyamanan hidup bersama demi mencapai kesejahteraan, dalam tahap ini manusia akan membentuk sebuah negara, baik berupa kerajaan, kekhalifahan, dan lain-lain.²

Sejarah banyak mencatat, muncul berbagai macam peradaban besar dunia yang masih bisa kita lihat sampai sekarang seperti peradaban di Suriah Besar, Mesopotamia, Mesir Kuno, Byzantium, Persia, Romawi, Peradaban masa kekhalifahan Islam, namun kehebatan dan kemegahan peradaban-peradaban

¹ Koentjaraningkrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta, Gramedia: 1981), hlm .9

² Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta, Bentang: 2001). hlm 13

tersebut tidak bisa menghindar dari kehancuran dan kemunduran yang disebutkan oleh kerusakan moral. Entah karena rusaknya moral para pemimpinnya maupun rakyatnya, bahkan keduanya. Karena apabila kita menarik garis merah antarperadaban tersebut kemunduran yang dialami terjadi ketika moral atau akhlaq yang tidak diperhatikan lagi.³ Karena memang lebih sulit mempertahankan prestasi daripada mencapainya.⁴

Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin bin Khaldun, atau dikenal dengan nama Ibnu Khaldun. Adalah ulama besar Islam, ilmuwan, sejarawan, negarawan dan akademisi yang sudah memprediksi secara detail tentang maju mundurnya peradaban dari hal yang terkecil sampai yang terbesar. Maksudnya, Ibnu Khaldun mampu menilai hal-hal yang mempengaruhi maju mundurnya peradaban mulai dari hal kecil, seperti bangunan-bangunan dan kesenian sebuah negara atau kerajaan hingga memberi penjelasan pada nilai-nilai peradaban dan bagaimana seharusnya peradaban itu berjalan. Penjelasan-penjelasan detail peradaban secara lengkap dijelaskan oleh Ibnu Khaldun dalam karya besarnya yaitu *Muqaddimah*.

Muqaddimah, buku sejarah terlengkap yang pernah ada di muka bumi. Begitu detail dan komprehensif dalam menjelaskan setiap sisi lini perjalanan kehidupan sosial manusia. Proses penulisan buku itu dilakukan oleh Ibnu Khaldun saat menyepi di Qal'at Ibn Salamah istana yang terletak di negeri Banu Tajin selama empat tahun. Selama masa kontemplasi itu, Ibnu Khaldun berhasil merampungkan sebuah karya monumental yang hingga kini masih tetap dibahas

³Prof.Dr. Hisham Thalbah dkk, *Ensiklopedi Mukjizat Al-Quran dan Hadis 1*, (Jakarta, PT Sapta Santosa: 2009). hlm.196.

⁴Syarifudin Junaidi, *Elaborasi Pemikiran Sosial Ibnu Khaldun*, (Yogyakarta, UIN SUKA pers: 2000). hlm. 27.

dan diperbincangkan. Dalam perenungan diri inilah Ibnu Khaldun merampungkan *Al-Muqaddimah*, sebuah karya yang seluruhnya orisinal dalam perencanaannya dan saya ramu dari hasil penelitian luas yang terbaik.⁵ Bahkan *Muqaddimah* merupakan tulisan yang banyak dikutip dan dijadikan rujukan para orientalis barat. Karena memiliki keberanian dalam analisis dan penilaian terhadap sejarah, budaya dan peradaban pada masanya sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa hingga saat ini.

Di tangan Ibnu Khaldun, sejarah menjadi sesuatu yang rasional, faktual dan bebas dari dongeng-dongeng. Bermodalkan pengalamannya yang malang-melintang di dunia politik pada masanya, Ibnu Khaldun mampu menulis *Al-Muqaddimah* dengan jernih. Dalam kitabnya itu, Ibnu Khaldun juga membahas peradaban manusia, hukum-hukum kemasyarakatan dan perubahan sosial. Lewat *Al-Muqaddimah*, Ibnu Khaldun adalah sarjana pertama yang menyatakan dengan jelas, sekaligus menerapkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar sosiologi.⁶ Itulah *Muqaddimah*, karya besar dari Ibnu Khaldun yang melaluinya, pemikir Barat merujuknya dan mengakui kehebatannya sampai sekarang. Walaupun buku ini merupakan pengantar (*Muqaddimah*) dari karya lainnya yaitu *Al-Ibar*, namun namanya lebih terkenal sampai hari ini.

Muqaddimah sendiri terdiri dari enam bab, yang kesemuanya disusun secara sistematis dan saling berkaitan. Bab pertama *Muqaddimah* menjelaskan masyarakat secara umum, jenis dan peranannya terhadap dunia. Bab kedua yaitu

⁵Ali Abdul Wahid Wafi, *Ibnu Khaldun: Riwayat dan Karyanya* (Jakarta, Grafiti: 1985). hlm. 4.

⁶Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Thoha (Jakarta, Pustaka Firdaus: 2016). hlm. 407,

masyarakat nomad dan suku-suku dan bangsa-bangsa bar-bar.⁷ Bab ketiga menjelaskan negara-negara, khilafah, kedaulatan, dan kaidah-kaidah politik. Bab keempat tentang fisik peradaban, negara dan kota. Bab kelima mengenai perdagangan, cara kehidupan dan cara mendapatkan kehidupan. Pada bab terakhir menjelaskan ilmu pengetahuan dan cara mendapatkannya.

Dari keenam bab tersebut Ibnu Khaldun menjelaskan secara spesifik dan gamblang sebuah negara yang ideal. Dari bagian-bagian fisik sebuah negara seperti bangunan sampai nilai dan moral yang harus dijaga sebuah negara agar tetap utuh. Karena bagi Ibnu Khaldun, jatuh bangunya sebuah negara (peradaban) tergantung bagaimana moral para pemimpin dan rakyatnya.⁸ Di sini Ibnu Khaldun seperti memiliki konsep moral sebuah negara ideal yang begitu detail dijelaskan. Bagian tersebut dijelaskan dengan detail dalam bab ketiga yaitu Masyarakat Beradab, Negara Dan Kota.

Dari bab ketiga inilah, penulis akan menganalisis nilai dan etika politik dari pemikiran Ibnu Khaldun dalam bukunya *Muqaddimah* menjadi sebuah konsep moral politik yang sistematis dengan menggunakan teori Arkeologi pengetahuan Foucault. Karena Ibnu Khaldun menjelaskan nilai moral suatu kepemimpinan negara dalam sebuah narasi sejarah yang runtut berdasar keadaan politik waktu itu. Sehingga dengan teori arkeologi pengetahuan ini dirasa sesuai untuk menjelaskan pemikiran etika politik negara Ibnu Khaldun tersebut.

Penelitian ini menjadi menarik dikaji dalam ilmu politik karena mengangkat negara secara umum sebagai objek dan jug dilihat dari konsep nilai

⁷Ibnu Khaldun, Abdurrahman, *Muqoddimah (Teks Arab: Scanning of University of Toronto), Toronto*, (Toronto University Library: 2007).hlm.78,

⁸Muammad Abdulah Enan, *Biografi Ibnu Khaldun*, (Jakarta, Zaman: 2013).hlm. 147,

atau etika yang seharusnya diterapkan baik oleh pemimpin maupun rakyatnya. Dengan demikian, etika politik suatu negara menurut Ibnu Khaldun, yang akan diteliti nantinya, akan sangat bermanfaat bagi negara-negara di dunia agar belajar bagaimana negara-negara dan peradaban masa lalu hancur karena rusaknya moral. Khususnya bagi Indonesia, yang saat ini, baik pemimpin maupun rakyatnya sedang mengalami krisis moral. Sehingga terhindar dari kehancuran dan negara gagal seperti peradaban-peradaban besar masa lalu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Arkeologi Pengetahuan Etika Politik dalam *Muqoddimah*?
2. Bagaimana Konsep Etika Politik Kontemporer dalam *Muqoddimah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini secara teoritis adalah untuk memberi kontribusi akademis bagaimana konsep etika politik yang dalam *Muqaddimah* karya Ibnu Khaldun.

Secara praktis penelitian ini mengungkap bagaimana etika politik suatu negara menurut Ibnu Khaldun dari analisis sejarah peradaban-peradaban besar masa lalu.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka dapat dirumuskan manfaat dari hasil penelitian secara teoritis adalah agar mendapatkan pengetahuan bahwa dengan konsep etika politik menurut Ibnu Khaldun mampu memberikan gambaran bagaimana idealnya moral sebuah negara agar tidak menuju kehancuran.

Secara praktis, manfaat penelitian ini agar masyarakat umum maupun akademis bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan terkait bagaimana etika politik yang harus diterapkan oleh sebuah negara baik pemimpin maupun rakyatnya agar terhindar dari kehancuran dan negara gagal.

D. Kajian Pustaka

Sudah banyak sekali tulisan dan karya yang menjelaskan Ibnu Khaldun, baik pemikirannya, biografinya, karya, dan karir keilmuannya, baik yang berasal dari bukunya *Muqaddimah*, *Al-Ibrar*, dan buku-buku yang lainnya. Tidak hanya itu, kajian Ibnu Khaldun juga sudah diteliti dari berbagai cara pandang dan berbagai sudut keilmuan, dari yang paling sering yaitu dari sudut pandang sosiologi, pendidikan, ekonomi, politik, hukum dan lain-lain.

Seperti penelitian dengan tema terbanyak yaitu sosiologi, dalam tulisan Fuad Baali dengan judul *Society, State and Urbanism: Ibnu Khaldun's*

Sociological Thought⁹. Begitu juga dalam tema politik seperti tulisan Mohammad Mahmoud Rabi dengan judul *The Political Theory Of Ibn Khaldun*.¹⁰ dan juga dalam tulisan Zainuddin, A. Rahman, Suwandi S. Brata, And Miriam Budiardjo dengan judul *Kekuasaan Dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*.¹¹

Selain itu banyak tulisan yang bertemakan pendidikan seperti buku *Muslim Educational Thought In The Middle Ages* karya S. M. Ziauddin Alavi¹², kemudian pada judul *Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibnu Khaldun: Perspektif Pendidikan Modern* karya Warul Walidin¹³ dan *Konsepsi Pendidikan Ibnu Khaldun: Suatu Analisa Fenomenologi* karya Masrudin Siregar.¹⁴ Adapu tulisan yang bertema sejarah seperti tulisan berjudul *Ibn Khaldun: History As Science And The Patrimonial Empire* karya Robert Simon¹⁵. Ada juga tulisan yang membahas pemikiran Ibnu Khaldun secara umum yang ditulis oleh Fuad Baali dan Ali Wardi dengan judul *Ibnu Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*.¹⁶

Pada tuisan kali ini, akan dikaji pemikiran Ibnu Khaldun mengenai etika politik. Kajian ini menjadi menarik dan berbeda dengan kajian tentang Ibnu Khaldun sebelumnya yang sudah pernah ada. Karena belum ada kajian dan tulisan

⁹Fuad Baali, *Society, State, And Urbanism: Ibn Khaldun's Sociological Thought*, (New York: State University of New York Press, 1998). hlm. 34.

¹⁰Mohammad Mahmoud Rabbi, *The Political Theory, of Khaldun*, (New York: EJ Brill, 1967). hlm. 194.

¹¹Zainuddin, A. Rahman, Suwandi S. Brata, and Miriam Budiardjo, *Kekuasaan dan negara: pemikiran politik Ibnu Khaldun*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992). hlm.26.

¹²S. M. Ziauddin Alavi, *Muslim Educational Thought in the Middle Ages*, (London: Atlantic Publisher, 1988).hlm.88.

¹³Warul Walidin. *Konstelasi pemikiran pedagogik Ibnu Khaldun: perspektif pendidikan modern*. (Bandung: Nadiya Foundation, 2003).hlm.31.

¹⁴Masrudin Siregar, *Konsepsi Pendidikan Ibnu Khaldun: Suatu Analisa Fenomenologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999). hlm. 55.

¹⁵Robert Simon, *Ibn Khaldun: History As Science And The Patrimonial Empire*, (Budhapest: Akademiai Kiado, 2002).hlm.87.

¹⁶ Fuad Baali dan Ali Wardi, *Ibnu Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1989).hlm.19.

tentang Ibnu Khaldun yang fokus pada etika politik suatu peradaban ataupun negara dengan sumber utama yaitu buku *Muqaddimah*-nya. Kebanyakan hanya fokus kepada pemikiran Ibnu Khaldun dalam hal politik secara umum dan teknis, sehingga fokus terhadap etika politik inilah yang menjadi daya tarik dan pembeda dengan tulisan-tulisan tentang Ibnu Khaldun sebelumnya.

Sebagai pembanding, di bawah ini merupakan tabel yang berisi daftar tulisan dan penelitian tentang pemikiran Ibnu Khaldun:

No	Judul	Penulis	Tahun	Fokus/Tema	Pendekatan	Metode
1	The Political Theory Of Ibn Khaldun	Mohammad Mahmud Rabi	1967	Teori politik Ibnu Khaldun	Politik	Kualitatif
2	Society, State, And Urbanism: Ibn Khaldun's Sociological Thought	Fuad Baali	1988	Pemikiran Sosiologi Ibnu Khaldun	Sosiologis	Kualitatif
3	Muslim Educational	S. M. Ziauddin	1988	Pemikiran tentang pendidikan salah	Pendidikan	Kualitatif

	Thought In The Middle Ages	Alavi		satunya Ibnu Khaldun		
4	Ibn Khaldun: History As Science And The Patrimonial Empire	Robert Simon	2002	Pemikiran sejarah Ibnu Khaldun	Sejarah	Kualitatif
5	<i>Kekuasaan Dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun</i>	Zainuddin, A. Rahman, Suwandi S. Brata, And Miriam Budiardjo	1992	Pemikiran politik Ibnu Khaldun terkait kekuasaan dan negara	Politik	Kualitatif
6	Ibnu Khaldun Dan Pola Pemikiran Islam	Fuad Bali dan Ali Wardi	1989	Pola pemikiran Islam secara umum	Ontologis	Kualitatif
7	<i>Konstelasi</i>	Warul	2003	Pemikiran Ibnu	Pendidikan	Kualitatif

	<i>Pemikiran Pedagogik Ibnu Khaldun: Perspektif Pendidikan Modern</i>	Walidin		Khaldun tentang pendidikan		
8	Konsepsi Pendidikan Ibnu Khaldun: Suatu Analisa Fenomenologi	Masrudin Siregar	1999	Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan	Pendidikan	Kualitatif

Dari daftar Kajian Pustaka di atas, bisa dilihat bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas diantara tulisan-tulisan tentang Ibnu Khaldun. Penelitian ini lebih memfokuskan kepada pemikiran Ibnu Khaldun mengenai etika politik, yaitu moralitas sebuah kepemimpinan agar tetap terjaga keutuhan dan kesejahteraan negara tersebut, yang belum pernah ditulis sebelumnya. Sehingga penelitian ini menarik untuk dilanjutkan menjadi

temuan baru yang berbeda dan tentunya memberikan perspektif baru dari pemikiran Ibnu Khaldun.

E. Kajian Teoritik

1. Arkeologi Pengetahuan

Kata Arkelogi Pengetahuan ini bagi Foucault mempunyai arti lain daripada arti yang bisaa, yaitu ilmu purbakala. Kita lihat tadi bahwa setiap diskursus ditentukan oleh suatu apriori histrois. Lebih konkret itu berarti bahwa setiap zaman mempunyai suatu “sistem pemikiran” yang menjuruskan cara mempraktekan ilmu pengetahuan pada zaman tersebut. Sistem pemikiran ini oleh Foucault sering kali disebut *episteme*. *Episteme* itu bisaanya tinggal implisit dan tidak perlu sama dengan teori ilmu pengetahuan eksplisit yang terdapat pada zaman itu. Karena jarak kita sekarang ini terhadap zaman itu sudah cukup jauh, maka bagi kita menjadi mungkin untuk mempelajari dan memperlihatkan episteme itu.

Usaha untuk mengeksplisitkan atau menggali episteme yang menentukan suatu periode tertentu oleh Foucault disebut arkeologi atau analisa arkeologi. Dalam *Arkeologi Pengetahuan* ia mulai dengan membedakan arkeologi dari sejarah pemikiran gaya lama yang menggunakan paham-paham seperti “evolusi”, “kontinuitas”, “totalisasi”. Dari yang sudah dikatakan sampai sekarang kiranya dapat dimengerti bahwa Foucault dengan tegas menolak cara bekerja itu sebagai tidak memuaskan.¹⁷

¹⁷ Michel Foucault, *Arkeologi Pengetahuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), hlm. 206.

Metode arkeologi dalam penelusuran episteme-episteme dalam sejarah memiliki empat prinsip mendasar yang membedakan arkeologi dengan sejarah ide atau pemikiran pada umumnya. Keempat prinsip tersebut akan menjelaskan secara teoritis bagaimana Arkeologi Pengetahuan Foucault ini menganalisis pemikiran moral politik Ibnu Khaldun;

- a. Arkeologi tidak mencari penemuan-penemuan seperti dalam sejarah pemikiran. Arkeologi berusaha memperlihatkan regularitas suatu praktek diskursif. Dengan 'regularitas' dimaksudkan keseluruhan kondisi-kondisi yang memainkan peranan dalam suatu diskursus dan menjamin serta menentukan jadinya diskursus itu. Belum tentu regularitas tampak pada ilmuan-ilmuwan paling besar dan paling original dalam suatu periode. Justru bisa saja paling jelas pada tokoh-tokoh yang kurang menonjol dan kurang original.

Prinsip pertama yaitu menganalisis bagaimana praktik-praktik politik regularitas yang dijabarkan dalam *Muqaddimah* Ibnu Khaldun. Maksudnya, secara detail akan dianalisis pada tiap-tiap bagian, tidak hanya pada bagian yang menonjol saja, namun terhadap spesifikasi-spesifikasi yang ada.

- b. Dalam analisis arkeologi, kontradiksi-kontradiksi harus dilukiskan seperti apa adanya, tidak memandang kontradiksi sebagai sesuatu yang tampak pada permukaan saja dan harus dilenyapkan karena

suatu kesatuan lebih mendalam; dan juga tidak sebagai suatu prinsip tersembunyi yang harus ditelanjangi.

Setelah menemukan regularitas dari aktivitas politik dalam *Muqaddimah*, langkah selanjutnya yaitu mencari kontradiksi-kontradiksi, konflik, kompetisi yang terjadi yang dijelaskan Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*. Langkah ini haruslah mampu menemukan detail-detail kontradiksinya.

- c. Analisa arkeologis akan menyangkut perbandingan-perbandingan: perbandingan antara satu praktik diskursif dan praktek diskursif lainnya atau perbandingan antara suatu praktek non-diskursif (lembaga-lembaga, kejadian-kejadian politik, proses-proses ekonomis dan sosial).

Langkah selanjutnya yaitu membandingkan praktik-praktik yang berhubungan dengan aktivitas politik maupun lembaga politiknya. Sehingga bisa dinilai dan dibandingkan bagaimana keseluruhan perpolitikan dalam *Muqaddimah*.

- d. Analisa arkeologis melukiskan perubahan. Tetapi ia tidak menerangkan perubahan sebagai penemuan baru (menurut model “penciptaan” yang bersifat teologis atau estetis) atau sebagai keinsyafan baru secara mendadak (atau menurut model psikologis)

atau sebuah evolusi (menurut model biologis). Arkeologi menganalisa perubahan sebagai pelbagai macam transformasi. Itu berarti bahwa diskontinuitas tetap diakui, tetapi diskontinuitas tidak dianggap suatu tujuan pada dirinya. Arkeologi memperlihatkan perbedaan-perbedaan sedangkan sejarah pemikiran cenderung untuk menutup perbedaan-perbedaan. Jadi, analisa arkeologis menghormati keadaan faktual. Arkeologi juga tidak mengandaikan bahwa semua objek, konsep, dan pendapat teoritis akan berubah, bila terjadi suatu bentuk diskursif baru. Bisa saja sejumlah unsure tetap tinggal sama, sekalipun sudah termasuk suatu bentuk diskursif yang baru.

2. Epistemologi Etika dan Moral

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas kita mulai dengan mempelajari etimologi kata-kata ini. Seperti halnya dengan banyak istilah yang menyangkut konteks ilmiah, istilah "etika" pun berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani *ethos* dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti: tempat tinggal yang biasa; padang rumput, kandang, habitat; kebiasaan, ini mengubah lagi penjelasannya tentang kata "etika". Sejak edisi ke-2 (1991) KBBI memberikan dua entri yang berbeda: "etik" (dalam edisi 1988 belum ada) dan "etika". "Etik" meliputi arti ke-2 dan ke-3 dari "etika" dalam edisi 1988, sedangkan "etika" dikhususkan untuk ilmunya. Dengan demikian "etika" dimengerti sebagai ilmu yang mempelajari "etik".

Dengan demikian kita sampai pada tiga arti berikut ini. Pertama, kata "etika" bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Misalnya, jika orang berbicara tentang "etika suku-suku Indian", "etika agama Budha", "etika Protestan" (ingat akan buku termasyhur Max Weber *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*), maka tidak dimaksudkan "ilmu", melainkan arti pertama tadi. Secara singkat, arti ini bisa dirumuskan juga sebagai "sistem nilai". Dan boleh dicatat lagi, sistem nilai itu bisa berfungsi dalam hidup manusia perorangan maupun pada taraf sosial. Kedua, "etika" berarti juga: kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah kode etik.

Arti terakhir inilah menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah "etika" yang oleh filsuf Yunani besar Aristoteles (384-322 SM) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral.¹⁸ Jadi, jika kita membatasi diri pada asal-usul kata ini, maka "etika" berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dengan memberi istilah modern, dapat dikatakan juga bahwa etika membahas "konvensi-konvensi sosial" yang ditemukan dalam masyarakat. Namun, menelusuri arti etimologis saja belum cukup untuk mengerti apa yang dalam buku ini dimaksudkan dengan istilah "etika".

Etika dijelaskan dengan membedakan tiga arti: 1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral

¹⁸ K. Bertens, *Etika Seri Filsafat* (Jakarta, Gramedia: 2007) hlm. 55.

(akhlak); 2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; 3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat". Kamus baru ini memang lebih lengkap. Dengan penjelasan ini dapat kita mengerti kalimat seperti "Dalam dunia bisnis etika merosot terus", karena di sini "etika" ternyata dipakai dalam arti yang ketiga. Namun, dalam edisi-edisi berikutnya kamus baru Etika sebagai ilmu dapat membantu juga untuk menyusun kode etik. Etika dalam arti ketiga ini sering disebut "filsafat moral".

3. Etika Politik

Etika politik termasuk ke dalam filsafat moral tentang dimensi politik manusia, sehingga etika politik masuk dalam kerangka filsafat pada umumnya. Sebagai salah satu cabang etika khusus, etika politik masuk dalam lingkup filsafat. Filsafat sendiri adalah ilmu yang memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mahapenting umat manusia, yang cakupannya berada di luar ilmu-ilmu yang ada sebelumnya. Filsafat menjadi ilmu yang dianggap memiliki nalar yang mendalam terhadap pencarian-pencarian mendasar umat manusia hingga saat ini, tentunya dengan bantuan ilmu lain baik ilmu sosial maupun sains yang sebenarnya merupakan cabang dari filsafat itu sendiri.

Namun, bukan berarti filsafat memberikan semua jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada. Begitu juga jawaban yang diberikan oleh filsafat tidak bersifat benar dan mutlak. Ini lah salah satu hal yang masih dipahami secara keliru terhadap filsafat. Sebaliknya, sejatinya filsafat malah

memberikan jawaban yang tidak pernah “final” dan masalah-masalah yang dijawab tersebut tidak akan pernah “selesai”. Berbeda dengan ilmu sains atau eksak lainnya bahwa filsafat menemukan jawaban dengan metodenya sendiri, karena filsafat sebenarnya tidak membantu memecahkan masalah namun mendorong kepada manusia untuk menghadapi masalahnya sendiri, tanpa mengabaikan usaha-usaha ilmiah.¹⁹

Etika sendiri dibagi menjadi dua yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum menyelidiki nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip dasar yang berlaku secara universal bagi segenap tindakan dan perilaku manusia. Sedangkan etika khusus menjelaskan mengenai prinsip-prinsip universal tersebut ke dalam hubungan dengan kewajiban manusia dalam berbagai lingkup dan aspek kehidupannya. Harus dibedakan antara etika individual yang mempertanyakan kewajiban umat manusia sebagai individu, terutama terhadap dirinya sendiri dan melalui suara hati Ilahiah dan terhadap etika sosial. Sedangkan etika sosial lebih luas daripada etika individu karena hampir semua kewajiban umat manusia pasti berdampak dengan realita bahwa ia merupakan makhluk sosial. Dengan tabiat manusia sebagai makhluk pribadi yang berhubungan secara sosial, menjadikan etika sosial membahas norma-norma moral yang sangat menentukan sikap, perilaku dan tindakan dalam hubungan antarmanusia.

Etika sosial sendiri memuat banyak etika khusus yang mengenai wilayah-wilayah kehidupan manusia tertentu. Misalnya kewajiban dan

¹⁹ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia: 1988) hlm. 17.

tanggung jawab di sekitar awal kehidupan, masalah aborsi, dan etika hubungan seksual, akan tetapi juga norma-norma moral yang berlaku dalam hubungan dengan komunitas-komunitas masyarakat yang terlembaga seperti keluarga, etika profes, etika pendidikan dan lain-lain. Di sini, termasuk juga etika politik atau filsafat moral mengenai dimensi politis kehidupan umat manusia.²⁰

Etika politik sendiri menjawab dua pertanyaan utama, pertama yaitu bagaimana seharusnya menata masyarakat yang ideal dan bagaimana etika kepemimpinan yang bisa menjaga lembaga-lembaga negara seperti hukum dapat berjalan dengan adil dan bijaksan. Selain itu membahas tentang bagaimana bentuk negara yang seharusnya demokratis. Kedua apa yang seharusnya menjadi dasar dan tujuan segala kebijakan politik.

Dimensi politis manusia ini memiliki dua sisi mendasar yang saling mengisi. Manusia adalah makhluk yang tau dan yang mau yang di satu pihak memerlukan pengenalan atau orientasi, di lain pihak berdasar orientasi tersebut manusia menggunakan untuk mengambil keputusan. Bisa dikatakan dua kemampuan mendasar (fundamen) manusia ini adalah kemampuan pengertian (ingin tahu) dan kemampuan bertindak berdasar pengetahuannya. Sesuai dengan kedua kemampuan tersebut, maka harus ada pula cara untuk menatanya yaitu dengan cara normatif. Lembaga yang berwenang dalam hal ini yaitu lembaga hukum. Hukumlah yang menjadi aturan bersama dan batasan

²⁰ Azra, Azyumardi, *Etika dan Logika Berpolitik* (Bandung, Rosda Karya: 2009) hlm.72.

bagaimana masyarakat harus bertindak baik dalam kehidupan politik, ataupun yang lainnya. Hukum berisi norma-norma yang menjelaskan tindakan yang benar di dalam masyarakat secara menyeluruh. Namun, hukum sendiri bersifat normatif dan tidak efektif, maksudnya hukum tidak bisa menjamin setiap anggota masyarakat taat dan tidak melanggar terhadap hukum yang ada. Maka harus ada institusi yang sah yang berkuasa yang diberi wewenang oleh masyarakat suatu wilayah untuk memaksakan kehendak hukum. Yaitu negara. Negara sendiri menjadi penata hukum yang *de facto* menentukan kelakuan masyarakat.

Dengan demikian, hukum dan kekuasaan negara merupakan bahasan utama etika politik. Seperti yang sudah dijelaskan, hukum adalah lembaga penata masyarakat yang normatif sedang kekuasaan negara sebagai lembaga penata masyarakat secara efektif, sesuai dengan dua kemampuan dasar (fundamen) manusia. Singkatnya, etika politik membahas hukum dan kekuasaan. Jadi masalah pokok etika politik adalah masalah legitimasi hukum dan kekuasaan serta penilaian kritis terhadap legitimasi-legitimasi yang diajukan.

4. Inti Paham Kekuasaan Religius

Inti permasalahan etika politik adalah masalah legitimasi etis kekuasaan yang dapat dirumuskan dalam pertanyaan: Dengan hak moral apa seseorang atau sekelompok orang memegang dan menggunakan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki? Seberapa besar pun kekuasaan dan wewenang

yang dimiliki, ia selalu dapat dihadapkan dengan tuntutan untuk mempertanggungjawabkannya. Apabila dinilai tidak bertanggungjawab, kekuasaan tidak lagi dianggap sah. Pertanggungjawaban seorang penguasa haruslah terdiri dari tiga aspek yang harus selalu ada yaitu: (1) Seseorang adalah penyebab atau berwenang (2) atas apa yang diperbuatnya (3) berhadapan dengan pihak-pihak yang menuntut pertanggungjawaban. Dengan kata lain, mempertanggungjawabkan kekuasaan mengandaikan bahwa penguasa memang memiliki kekuasaan dan masyarakatpun berhak untuk meminta pertanggungjawaban, sehingga hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan (politik) merupakan realitas sosial-duniawi.

Sebagai wakil Tuhan di dunia, para penguasa dalam lingkup kekuasaan religius harus memiliki nilai-nilai inti yang mendasar. Agar masyarakat yang dipimpin memiliki kepercayaan dan mau memberikan legitimasi kepada penguasanya secara sah sebagai wakil Tuhan. Walaupun dalam prakteknya, banyak para penguasa yang mengatasnamakan wakil Tuhan bertindak sewenang-wenang, sehingga dipertanyakan legitimasinya oleh masyarakatnya. Ada beberapa inti paham kekuasaan religius yang bisa digunakan sebagai aspek-aspek yang menjadi dasar kekuasaan yang bersifat religius tersebut.²¹

²¹ Ibnu Khaldun, *Muqoddimah* terj. Ahmadie Thoha, hlm. 68.

1. Lahir dan Batin

Secara hakiki, setiap makhluk yang berbadan adalah wujud dirinya dalam lingkup duniawi. Namun sumber identitasnya bersifat batiniah. Realitas batiniah ini, selalu ada dalam diri manusia. Dari realitas batiniah ini lah akan mengalirkan sikap-sikap dan tindakan-tindakan kita di alam jasad kita. Penyeimbangan kedua realitas ini (lahiriah dan batiniah) harus dimiliki oleh seorang penguasa religius, karena dirinnya merupakan perlambangan duniawi dari alam ilahiah. Kekuatan ilahiah yang diyakini begitu dahsyat yang terpancar melalui alam semesta menjadi sumber kekuatan bagi penguasa kekuasaan religius. Kekuatan ilahiah ini, menjadi sangat penting, karena alam semesta termasuk manusianya yang merupakan sumber dan roda kehidupan merupakan representasi dari kekuatan ilahiah. Ketergantungan terhadap kekuatan ilahiah ini menjadi sesuatu yang mutlak dan harus dijaga keharmonisan dan keseimbangannya oleh sang penguasa sebagai wakil Tuhan di dunia, entah dengan cara ibadah formal, laku batin, menjauhi larangan-larangan Tuhan dan melayani makhluk Tuhan lainnya.

2. Kekuasaan

Kekuasaan dalam lingkup kuasa religiusitas ini adalah bagaimana menjalankan perintah ilahiah demi kesejahteraan alam semesta, bukan hanya bagaimana menjalankan kekuasaan kepada masyarakat saja. Jadi, penguasa dinilai mampu menampung kekuatan-kekuatan kosmis (ilahiah) yang juga melaluinya diyakini akan membawa kesejahteraan yang sejati.

3. Tanda-Tanda Kekuasaan

Tanda kewibawaan penguasa yang paling meyakinkan adalah keselarasan sempurna dalam wilayah kekuasaannya. Keselarasan adalah hasil perwujudan dan perpaduan sempurna antara semua kekuatan yang bekerja dalam satu wilayah, baik itu dari faktor sosial maupun kekuatan-kekuatan alam karena keduanya terdapat di satu haikat dan bersifat sama.

4. Budi Penguasa

Budi luhur penguasa adalah aspek penting dalam kekuasaan religius. Dengan budi yang baik, penguasa harus mampu mencapai keadaan sejahtera, adil, makmur, tentram dan damai dalam masyarakatnya tanpa menggunakan cara-cara yang kasar. Tanda keselarasan keselarasan dan keseimbangan yang sempurna adalah mampu mempertahankan keadaan yang baik tanpa adanya tindakan-tindakan kasar. Jadi, kemerosotan kedudukan dan prestasi penguasa bukan berasal dari faktor-faktor luar dirinya namun karena budi halus dan akhlaknya sendiri. Sehingga kepercayaan masyarakat akan menurun.

5. Legitimasi Kekuasaan Religius

a. Tidak Adanya Tuntutan Legitimasi Etis

Segala bentuk kekuasaan agar kuat dan bertahan lama pasti memerlukan legitimasi. Begitu juga legitimasi kekuasaan dalam paam religius seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Etika politik sendiri menuntut agar

segala bentuk kekuasaan dilaksanakan dengan hukum yang berlaku (legalitas), disahkan secara demokratis dan tidak bertentangan dengan dasar moral (legitimasi moral), dan legitimasi moral ini bersifat duniawi karena berhubungan langsung dengan tanggung jawab manusia.

Namun, secara kasus yang berbeda, dalam kekuasaan religius yang adiduniawi legitimasi etis tidak dapat dituntut. Seorang penguasa kekuasaan religius tidak harus menanyakan apa yang dikehendaki rakyatnya dan tidak pula bergantung kepada lembaga atau dewan perwakilan rakyat. Dengan analogi bahwa penguasa adalah wakil Tuhan yang suci dan memiliki ketetapan hukum yang tidak bisa diganggu gugat. Hal terpenting adalah bagaimana penguasa memberikan dampak yang baik bagi rakyatnya dengan pencapaian adil, makmur dan sejahtera. Cita-cita pemerintahan yang demokratis adalah asing dalam kekuasaan religiusitas.

b. Legitimasi Religius

Ada tiga unsur yang termuat dalam legitimasi religius. Pertama, penguasa sebagai wakil Tuhan harus menunjukkan bahwa dirinya mampu untuk memegang dan menjalankan kekuasaan. Baik kemampuan fisik maupun psikisnya. Kedua, kemampuan empiris dalam menciptakan keadaan adil dan makmur. Seorang penguasa religius dianggap tidak mampu mengemban tugas sebagai penguasa apabila dirinya tidak mampu menciptakan keadaan yang diharapkan oleh masyarakatnya. Hal ini berlaku secara otomatis. Ketiga, penguasa harus mampu menunjukkan mental atau

sikap budinya yang dalam kemampuannya menjaga kesimbangan hubungan dengan hal yang bersifat ilahiah. Jadi apabila raja bersikap kasar dan sewenang-wenang dan berakibat menyengsarakan rakyat maka dengan sendriya kekuasaan dan kewibawaan sang penguasa akan luntur dan lambat laun tidak akan dipercaya lagi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) atau studi teks, dan termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berlaku bagi pengetahuan humanistik atau interpretatif yang secara teknis, penekanannya lebih pada teks.²²

Penelitian kepustakaan dilakukan karena sumber-sumber datanya, baik yang utama (primary resources), maupun pendukung (secondary resources), seluruhnya adalah teks-teks. sehingga untuk memperoleh data digunakan metode dokumentasi. Metode ini digunakan dalam mengumpulkan data-data yang relevan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder.²³

²² Robert Bogdan & Steven J. Taylor, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 12.

²³ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya).1997.hlm 30.

Oleh karena itu, analisis dimaksud sebagai analisis untuk membongkar maksud-maksud dan makna-makna tertentu. Maka, dalam penelitian ini ingin mengetahui lebih jauh substansi dari teks *Muqaddimah* karya Ibnu Khaldun. Metode sendiri memiliki fungsi sebagai landasan dalam mengelaborasi suatu masalah, sehingga suatu masalah dapat diuraikan dan dijelaskan dengan gamblang dan dapat dipahami.²⁴

Bodgan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moloeng mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁵

2. Pendekatan

Dalam ilmu-ilmu sosial hermeneutika digunakan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah atau pengetahuan interpretatif, terutama dengan menggunakan metode *verstehen*.²⁶

Telaah hermeneutika mencari makna dari susunan kalimat, konteks budaya, tafsir transenden dan dari lainnya. Kebermaknaan suatu (fokus/tema) dapat dilandaskan pada narasi bahasa, narasi historis, filsafat, hukum, etika dan lainnya dengan berangkat dari logika linguistik.

²⁴ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru, Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung; Remaja Rosda Karya, 2006). hlm. 35.

²⁵ Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian*, hlm. 83.

²⁶ Syahrizal, *Filsafat Hermeneutika dalam penelitian ilmu-ilmu Sosial*, (Jurnal Adabiyah, Vol. 3, No. 5, Agustus 2001). hlm. 60.

Pendekatan hermeneutika digunakan agar dapat dicapai suatu nuansa pemahaman yang baru yang lebih produktif, tidak reproduktif mengulang-ulang pemahaman penafsiran sebelumnya. Dengan demikian akan terjadi lingkaran hermeneutika-historis, bahwa penafsiran yang baru hanya diketahui berdasarkan yang lama.

3. Teknik Analisis Data

Seluruh data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk dikategorisasikan atau dipilih dan dipilah berdasarkan sub-sub pokok bahasan. Dari sumber-sumber pustaka di atas penulis membangun struktur tulisan dengan metode analisis data untuk mencapai kesimpulan kesimpulan dari tulisan ini. Dalam proses analisis data, beberapa metode dipakai dalam penelitian ini, baik terkait dengan data primer maupun sekunder. Untuk menganalisis data primer dan sekunder, penyusun mempergunakan metode analisis kualitatif yaitu metode deskriptif-analitik, metode ini mengkaji gagasan primer mengenai suatu ruang lingkup masalah yang diperkaya dengan gagasan sekunder yang relevan.

Langkah pertama metode ini adalah mendeskripsikan gagasan primer yang menjadi obyek penelitian. Selanjutnya membahas gagasan primer tersebut yang pada hakikatnya memberikan “interpretasi” kepada gagasan primer yang telah dideskripsikan. Memberikan interpretasi di sini termasuk menarik relevansi atau implikasi masalah

yang diteliti. Semua konsep atau pemikiran politik peradaban *Muqaddimah* karya Ibnu Khaldun dilihat menurut keselarasannya atau sama lain atau ditelitiususunan logis sistematisnya dalam perkembangan pemikirannya dan diperiksa gaya dan metode berpikirnya, kemudian ditetapkan konsep mendasar atau tema pokok tentang epistemologis.

Sedangkan untuk interpretasi atas data-data penelitian dalam analisisnya peneliti menggunakan pola berpikir deduktif dan induktif. metode deduktif merupakan cara berfikir analitik yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum menuju pada kejadian yang bersifat khusus. Dalam metode ini, penulis berupaya merinci pemikiran politik peradaban *Muqaddimah* karya Ibnu Khaldun yang bersifat umum.

Selanjutnya metode induktif diartikan sebagai generalisasi²⁷. Dalam metode ini, kasus-kasus dan unsur-unsur pemikiran politik peradaban *Muqaddimah* karya Ibnu Khaldun dianalisis kemudian dirumuskan dalam statemen umum (generalisasi).

G. Sistematika Pembahasan

Rancangan penulisan tesis disusun secara sistematis yang terdiri dari empat bab agar lebih memudahkan pembaca untuk memahami isinya. Tiap-tiap bab menjelaskan konsep bahasan tema tesis dan rangkaian koherensinya

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 131.

yang saling berhubungan satu sama lain. Adapun konsep ancangan sistematika tesis itu adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metode penelitian dan urgensi penelitian. Sedangkan di dalam Bab II akan menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk menganalisa etika politik dalam *Muqoddimah* karya Ibnu Khaldun.

Selanjutnya Bab III akan dijelaskan mengenai Ibnu Khaldun dan karyanya *Muqaddimah*. Mulai dari biografinya (perjalanan hidup), alur pemikiran Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*. Selanjutnya penjelasan tentang karya-karyanya dan relasinya dengan *Muqaddimah*.

Kemudian pada Bab IV, analisis terhadap etika politik yang terdapat di dalam bagian-bagian *Muqoddimah* yang masih belum tersistematis dengan menggunakan teori arkeologi pengetahuan Michael Foucoult dan dijelaskan dengan detail dengan teori Etika Politik Franz Magnis Suseno. Terakhir, Bab V yaitu Kesimpulan, merupakan bagian akhir tesis yang menyajikan kesimpulan-kesimpulan penting dari pembahasan moral politik menurut Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar analisis yang sudah dilakukan terhadap buku Muqoddimah dengan menggunakan teori Arkeologi Pengetahuan Michael Foucoult dan Etika Politik Franz Magnis Suseno, bisa diambil kesimpulan bahwa:

1. Arkeologi Pengetahuan Etika Politik Ibnu Khaldun dalam Muqoddimah yaitu:
 - a. *Pertama*, bahwa kedudukan penguasa adalah kedudukan yang terhormat dan diperebutkan, karena memberikan kepada orang yang memegang kedudukan itu segala macam kekayaan duniawi dan juga kepuasan lahir batin. Kemudian harus diperhatikan pula bagaimana seorang pemimpin sebuah kekuasaan religius mampu membuktikan dirinya memang pantas menjadi seorang penguasa. Tidak ada tuntutan etis bagi penguasa kekuasaan religius. Tidak ada tuntutan etis ini bukan berarti sang pemimpin tidak ada nilai-nilai yang mengikat sama sekali. Seorang penguasa haruslah mampu menjaga ikatan solidaritas sosial rakyat di semua elemen di bawah pemerintahannya.
 - b. *Kedua*, Seorang penguasa kekuasaan religius tidak harus menanyakan apa yang dikehendaki rakyatnya dan tidak pula bergantung kepada lembaga atau dewan perwakilan rakyat. Kemudian, seorang penguasa tidak boleh membiarkan keluarganya terlalu ikut campur dalam

pemerintahan, bahkan sampai jabatan-jabatan vital hanya dibagikan kepada keluarganya. Seorang penguasa yang sudah terpilih atau yang melanjutkan kepemimpinan sebelumnya secara otomatis akan menimbulkan rasa bangga dan rasa sombong.

- c. *Ketiga*, bagi Ibnu Khaldun, pemimpin yang sebenarnya yaitu pemimpin yang didasarkan kepada ilmu dan ajaran agama dan seruan kebenaran. Dengan hal ini, maka pemimpin akan memiliki kekuatan yang luar biasa dan akan memiliki pemerintahan yang kuat. Kekuatan masyarakat akan bersatu dengan adanya nilai yang sama, yaitu nilai agama. Pemimpin yang memimpin dengan nilai agama, akan lebih mudah menjadikan rakyat lebih berpegang kepada nilai-nilai agama juga. Pemimpin diwajibkan tunduk kepada hukum itu berdasarkan keyakinan pemimpinnya, akan pahala dan dosa yang akan ditimpakan mereka di kahirat kelak. Begitu juga sebaliknya, kadang pemimpin juga menggunakan politik rasional sebagai dasar keputusannya.

Bahwa kedudukan penguasa adalah kedudukan yang terhormat dan diperebutkan, karena memberikan kepada orang yang memegang kedudukan itu segala macam kekayaan duniawi dan juga kepuasan lahir batin. Oleh karena itu, kursi kekuasaan menjadi sasaran untuk diperebutkan. Sehingga dibutuhkanlah konsep nilai dalam kekuasaan dan kepemimpinan agar seorang penguasa tidak terlena oleh kekayaan duniawi yang sangat mudah didapat berada di depan mata, setelah mendapatkan kursi kekuasaan.

Pemimpin yang kuat yaitu pemimpin yang didasarkan kepada ilmu dan ajaran agama dan seruan kebenaran. Dengan hal ini, maka pemimpin akan memiliki kekuatan yang luar biasa dan akan memiliki kerajaan yang kuat. Kekuatan masyarakat akan bersatu dengan adanya nilai yang sama, yaitu nilai agama. Pemimpin yang memimpin dengan nilai agama, akan lebih mudah menjadikan rakyat lebih berpegang kepada nilai-nilai agama juga.

Tidak ada tuntutan etis bagi penguasa kekuasaan religius. Tidak ada tuntutan etis ini bukan berarti sang pemimpin tidak ada nilai-nilai yang mengikat sama sekali. Namun adanya nilai-nilai agama yang dianut menjadikan sang pemimpin lebih memiliki tanggung jawab yang lebih. Karena melayani masyarakat harus dengan dasar nilai ilahiah dan mampu menghasilkan keadaan negara yang adil, makmur dan aman bagi rakyatnya. Sehingga rakyat pun harus tunduk kepada pemimpin sebagaimana mereka tunduk kepada ajaran agama, karena pemimpin adalah wakil Tuhan di muka bumi, serta berjuang terhadap kepentingan negara seperti mereka berjuang untuk kepentingan agamanya.

2. Etika Politik Kontemporer Ibnu Khaldun dalam Muqoddimah yaitu:
 - a. Pemimpin yang kuat yaitu pemimpin yang didasarkan kepada ilmu dan ajaran agama dan seruan kebenaran. Dengan hal ini, maka pemimpin akan memiliki kekuatan yang luar biasa dan akan memiliki kerajaan yang kuat.

Kekuatan masyarakat akan bersatu dengan adanya nilai yang sama, yaitu nilai agama.

- b. Manusia sebagai wakil Tuhan tetapah memiliki sisi duniawi yang rasionaitas. Kekuasaan politik yang rasionaltas ini, oleh Ibnu Khaldun terbagi menjadi dua. Pertama yaitu politik rasional yang berkenaan dengan kepentingan umum melalui seorang penguasa atau si pemimpin politik tersebut.
- c. Tipe politik rasional yang kedua yaitu yang hanya berkenaan dengan kepentingan raja. Bagaimana sang raja dapat melaksanakan melalui penggunaan kekuasaan dan kewenangannya secara paksa. Di sini, kepentingan umum sifatnya sekunder. Menurut Ibnu Khaldun, tipe inilah yang semuanya dipraktikkan oleh seorang raja, baik di kerajaan, kesultanan, kekhalfahan, baik itu muslim maupun kafir.
- d. Tanda kekuasaan yang *pertama* menurut Ibnu Khaldun yaitu adanya kekuatan militer yang mumpuni dan merata, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dengan adanya militer yang mumpuni secara kemampuan dan merata secara jumlah, maka negara tidak hanya aman dari serangan negara lain namun juga sang pemimpin mampu menjalankan tugas negaranya dengan baik dan lancar. Tanda kekuasaan yang *kedua* bagi sosok pemimpin politik atau penguasa adalah kemampuan untuk menghimpun dukungan yang kuat. Kekuatan di sini yang dimaksud adalah solidaritas dan ikatan sosial yang kuat di antara rakyatnya. Tanda kekuasaan yang *ketiga* menurut Ibnu Khaldun yaitu menjaga diri dari keterikatan asing.

- e. Kekuasaan yang hanya pada satu orang, kemewahan yang berlebihan, dan sifat malas yang sudah tidak terhindarkan lagi, maka negara dalam keadaan bahaya dan diambang kehancuran.
- f. Ketidakadaan legitimasi etis dari manusia, pemimpin kekuasaan religius mempunyai beban berat yang dipikul. Yaitu tanggung jawab kepada Tuhan selaku wakil-Nya dan tanggung jawab terhadap kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tanggung jawab tersebut berdasar kepada ajaran-ajaran agama, entah melalui kitab suci, sabda-sabda nabi, ataupun yang lainnya. Tanpa adanya pemahaman terhadap kedua tanggung jawab ini, maka kediktatoran tanpa kontrol sama sekali akan terjadi dan membahayakan keadaan negara.
- g. Ada tiga unsur yang termuat dalam legitimasi religius. *Pertama*, penguasa sebagai wakil Tuhan harus menunjukkan bahwa dirinya mampu untuk memegang dan menjalankan kekuasaan. Baik kemampuan fisik maupun psikisnya. *Kedua*, kemampuan empiris dalam menciptakan keadaan adil dan makmur. Seorang penguasa religius dianggap tidak mampu mengemban tugas sebagai penguasa apabila dirinya tidak mampu menciptakan keadaan yang diharapkan oleh masyarakatnya. Hal ini berlaku secara otomatis. *Ketiga*, penguasa harus mampu menunjukkan mental atau sikap budinya yang dalam kemampuannya menjaga keseimbangan hubungan dengan hal yang bersifat ilahiah.

B. Saran-Saran

Ibnu Khaldun memang bukanlah tokoh yang terkenal karena pemikiran dalam hal etika. Apalagi etika politik. Namun melalui buku Muqoddimah, yang sebenarnya merupakan buku sejarah, Ibnu Khaldun menjelaskan banyak sekali ilmu-ilmu tentang masyarakat salah satunya politik. Dalam Muqoddimah, Ibnu Khaldun memberikan gambaran yang jelas dan detail mengenai bagaimana sikap dan tindakan seorang pemimpin politik yang baik. Bagaimana seorang penguasa harus memerintah sesuai nilai-nilai luhur dan berpihak kepada rakyat. Walaupun tidak dijelaskan secara sistematis dan masih terkesan sporadis.

Dengan teori Arkeologi Pengetahuan dan Etika Politik, etika politik dalam Muqoddimah bisa ditampilkan dan dipahami secara sistematis. Sehingga bisa dilihat dan dipelajari bagian-perbagian, aspek-peraspek secara lebih mudah dan nyaman dibaca. Terutama bagi negara-negara dengan berbagai jenis sistem dan bentuk pemerintahan bisa belajar dan mengambil hikmah bagaimana sebuah kerajaan, negara, kekhalifahan terbentuk, berkembang, jaya dan kemudian hancur, dengan melihat etika politik pemimpinnya dalam memerintah.

Sehingga saran yang diberikan yaitu agar setiap pemimpin negara saat ini, belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh para pendahulu mereka. Agar kesalahan yang sama karena tidak memperhatikan etika dalam berpolitik tidak terulang lagi. Sejarah membuktikan, emperium-emperium besar hancur dan lenyap bukan karena lemahnya ekonomi, militer, ataupun pendidikannya, namun karena rusaknya moral pemimpin dan rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jamil, *Seratus Muslim Terkemuka*, Jakarta, Pustaka Firdaus: 1994.
- Alavi, S. M. Ziauddin, *Muslim Educational Thought in the Middle Ages*, London: Atlantic Publisher, 1988.
- Ali, A. Mukti, *Ibnu Khaldun dan Asal Usul Sosiologi*, Yogyakarta, Nida: 1970.
- Amin, Husyain Ahmed, *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam*, Bandung, Remaja Rosda Karya: 1995.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian; suatu pendekatan praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Audah, Ali, *Ibnu Khaldun Sebuah Pengantar*, Jakarta, Pustaka Firdaus: 1985.
- Azra, Azyumardi, *Etika dan Logika Berpolitik*, Bandung, Rosda Karya: 2009.
- Baali, Fuad dan Ali Wardi, *Ibnu Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1989.
- Baali, Fuad, *Society, State, And Urbanism: Ibn Khaldun's Sociological Thought*, New York: State University of New York Press, 1998.
- Bertens, K., *Filsafat Barat Kontemporer: Prancis*, Jakarta, Gramedia, 2001.
- Bertens, Kees, *Etika Seri Filsafat*, Jakarta, Gramedia: 2007.
- Bogdan, Robert & Steven J. Taylor, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Bouthoul, Gaston, *Ibn Khaldun Sa Philosophie Sociale*, Terj. Yudian W. Asmin, Yogyakarta, Titian Ilahi Press: 1998.
- Enan, Muammad Abdulah, *Biografi Ibnu Khaldun*, Jakarta, Zaman: 2013.
- Foucault, Michel, *Arkeologi Pengetahuan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2012.
- Foucault, Michel, *Power/knowledge; Selected Interview and Other Writings 1972-1977*, Oxford: Harverst Press, 1980.
- Gordon & Graham, *Teori-Teori Etika*, Bandung, Nusamedia : 2015.
- Hitti, Philip K., *Sejarah Ringkas Dunia Arab*, Yogyakarta, Iqra Pustaka: 2001.
- Huntington, Samuel, *Benturan Antarperadaban*, Yogyakarta, Qalam: 2008.

- Ikhwan, Hakimul, *Akar Konflik Sepanjang Zaman*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2004.
- Johnshon, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta, Gramedia: 1986.
- Junaidi, Syarifudin, *Elaborasi Pemikiran Sosial Ibnu Khaldun*, Yogyakarta, UIN SUKA pers: 2000.
- Khaldun, Ibnu, *Kontribusi Pemikiran Ibnu Khaldun di Bidang Sejarah, filsafat dan Agama, Negara dan Hukum serta Perubahan Sosial*, Yogyakarta, LSIPM: 1985.
- Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah*, Jakarta, Pustaka Firdaus: 2016.
- Khaldun, Ibnu, *Muqoddimah (Teks Arab: Scanning of University of Toronto)*, Toronto, Toronto University Library: 2007.
- Khudairi, Zainal, *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun*, Bandung, Penerbit Pustaka: 1979.
- Koentjaraningkrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta, Gramedia: 1981.
- Kristiadi, J., *Demokrasi dan Etika Bernegara*, Kanisius, Yogyakarta:2008.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta, Bentang: 2001.
- Maarif, Ahmad Syafii, *Ibnu Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur*, Jakarta, Gema Insani Press: 1996.
- Machiavelli, Niccolo, *Politik Kerakyatan*, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia: 1996
- Moloeng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997.
- Mufid, Muhamad, *Etika Filsafat dan Komunikasi*, Jakarta, Kencana: 2009.
- Mulyana, Dedy, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru, Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung; Remaja Rosda Karya, 2006.
- Plato, *The Republic*, terj Allan Bloom, New York, Basic Books: 1986.
- Rabbi, Mohammad Mahmoud, *The Political Theory, of Khaldun*, New York: EJ Brill, 1967.
- Roshenthal, Franz, *Etika Kekerjaan Muslim: Dari Al-Farabi hingga Ibn Khaldun*, Bandung, Mizan: 1996.
- Shaikh, M. Saeed, *Studies in Muslim Philosophy*, India: Adam Publisher and Distribution: 1994. vol.II
- Simon, Robert, *Ibn Khaldun: History As Science And The Patrimonial Empire*, Budhapest: Akademiai Kiado, 2002.

- Siregar, Masrudin, *Konsepsi Pendidikan Ibnu Khaldun: Suatu Analisa Fenomenologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Suseno, Franz Magnis, *13 Tokoh Etika*, Yogyakarta, Kanisius:1997.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia: 1988.
- Syarif, MM, *History of Muslim Philosophy*, Jakarta, Erlangga: 1986.
- Thalbah, Prof.Dr. Hisham dkk, *Ensiklopedi Mukjizat Al-Quran dan Hadis 1*, Jakarta, PT Sapta Santosa:2009.
- Wafi, Ali Abdul Wahid, *Ibnu Khaldun: Riwayat dan Karyanya*, Jakarta, Grafiti: 1985.
- Walidin, Warul, *Konstelasi pemikiran pedagogik Ibnu Khaldun: perspektif pendidikan modern*. Bandung: Nadiya Foundation, 2003.
- Zainuddin, A. Rahman, Suwandi S. Brata, and Miriam Budiardjo, *Kekuasaan dan negara: pemikiran politik Ibnu Khaldun*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Zainuddin, Rahman A., *Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Jakarta, Gramedia Pustaka:1990.

JURNAL

- Mastury, Muhammad, *Filsafat Manusia Menurut Ibnu Khaldun*, Majalah Al-jamiah: 1984.
- Syahrizal, *Filsafat Hermeneutika dalam Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jurnal Adabiyah, No. 5, Agustus 2001. Vol. 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muflih Fahmi Kaunain

Tempat Tanggal Lahir : 29 Oktober 1992

Alamat Rumah : Jambusari, Rt 002, Rw 007, Kertek, Wonosobo

Nama Ayah : Faqih Al-Aziz

Nama Ibu : Siti Sri Achadiyah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD, tahun lulus 2005
- b. SMP, tahun lulus 2008
- c. SMA, tahun lulus 2011
- d. S1, tahun lulus 2015

2. Pendidikan non formal

- a. Ponpes Aswaja Nusantara, Mlangi, Sleman, Yogyakarta

C. Pengalaman Organisasi

1. IPNU-IPPNU Rantaing cabang Jambusari 2007
2. Korps Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMY 2011
3. Forum Komunikasi Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Indonesia 2012
4. Forum Diskusi Ilmu Pemerintahan UMY 2013
5. Gusdurian 2014

D. Minat Keilmuan :

E. Karya Ilmiah

1. Buku:

- a. Gus Dur dan Pesantren, Diva Press Yogyakarta, (proses terbit)

2. Penelitian:

- a. Skripsi: Pengaruh Nilai Aswaja terhadap Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid

Muflih Fahmi Kaunain